BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kecamatan Purwokerto Selatan memiliki kesimpulan yang dibagi menjadi dua aspek utama:

1. Transparansi

Penerapan transparansi dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kecamatan Purwokerto Selatan menunjukkan variasi yang signifikan mulai dari sedang hingga tinggi antara kelurahan satu dengan yang lain. Beberapa kelurahan seperti Karangklesem dan Teluk telah mengadopsi praktik yang lebih terbuka dengan menggunakan sistem informasi dan platform digital untuk memonitor dan melaporkan penggunaan DAU kepada masyarakat, misalnya melalui SIPD.RI dan grup WhatsApp. Namun, masih ada tantangan di kelurahan lain seperti Tanjung dan Purwokerto Kulon yang hanya melaporkan kepada instansi pemerintah tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. Perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan informasi tentang alokasi dana dapat diakses secara mudah dan transparan oleh seluruh masyarakat.

2. Akuntabilitas

Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan DAU di Kecamatan Purwokerto Selatan dapat dikategorikan sedang hingga tinggi. Hal ini didasari pada kelurahan yang memastikan pelaporan keuangan yang ketat kepada pihak terkait seperti kecamatan atau kabupaten melalui SPJ dan penggunaan aplikasi SIPD.RI. Evaluasi dan pengawasan penggunaan DAU dilakukan oleh inspektorat dan badan pengawas lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Meskipun ada upaya untuk melibatkan masyarakat melalui forum Musrenbang, komunikasi langsung mengenai rincian alokasi dana masih kurang di beberapa kelurahan.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa langkah positif yang telah diambil, tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAU di Kecamatan Purwokerto Selatan belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang diharapkan. Tantangan signifikan masih ada dalam hal keterlibatan masyarakat dan aksesibilitas informasi. Upaya terus menerus diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperbaiki aksesibilitas dan kejelasan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Dengan demikian, pengelolaan dana yang lebih transparan dan akuntabel dapat dicapai, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal.

B. Saran

Studi ini telah menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang praktik pelaporan dan publikasi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di tingkat kelurahan. Dari kesimpulan yang diperoleh, teridentifikasi variasi signifikan dalam cara kelurahan melaksanakan tugas ini, yang mencerminkan beragam pendekatan dan strategi dalam menginformasikan masyarakat mengenai penggunaan dana publik tersebut.

1. Untuk penelitian lanjutan adalah melakukan studi komparatif yang lebih mendetail terhadap implementasi praktik pelaporan dan publikasi DAU di berbagai kelurahan atau kota. Dalam konteks ini, fokus dapat diberikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan praktik tersebut, seperti ukuran dan kompleksitas administratif daerah, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan membandingkan pendekatan yang berbeda, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan DAU di tingkat lokal.
2. Perlu adanya penerapan dan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) serta transparansi di daerah, pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam mengelola dan melaporkan penggunaan DAU, termasuk penggunaan

teknologi informasi untuk memudahkan pelaporan dan publikasi. Selain itu, penyusunan panduan praktik terbaik dalam pengelolaan dan pelaporan DAU berdasarkan studi komparatif dari berbagai kelurahan atau kota perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan. Penguatan peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum partisipatif dalam alokasi dan penggunaan DAU juga penting, dengan evaluasi menyeluruh untuk memastikan forum ini mencerminkan aspirasi masyarakat. Penerapan sistem pelaporan yang transparan melalui portal online, audit dan pengawasan berkala, serta partisipasi aktif masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pengawasan penggunaan DAU akan memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukannya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta kualitas layanan publik.

3. Perlu dilakukan penelitian yang mempelajari pengaruh transparansi dalam pelaporan penggunaan DAU terhadap tingkat akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan menganalisis hubungan antara tingkat transparansi dalam pengelolaan anggaran dan responsibilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat, penelitian ini dapat menggali dampak positif dari transparansi yang tinggi terhadap kepercayaan publik dan efisiensi penggunaan dana publik. Studi semacam ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya komunikasi yang terbuka dan inklusif dalam membangun hubungan yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakatnya. Secara keseluruhan, dengan mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam ketiga area ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi inovatif dan praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Alokasi Umum di tingkat kelurahan. Hal ini akan berkontribusi signifikan dalam memperkuat hubungan antara pemerintah lokal dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.